

SINGLE SIGN ON
E-GOV
KABUPATEN PEMALANG

INTEGRASI DATA PEMERINTAH DESA
DENGAN SISTEM E-GOV KABUPATEN PEMALANG

CURRICULUM VITAE

Haktivis TIK Indonesia



@AndriJohandri
<http://andrijohandri.id>
johandri@puspindes.id

Nama : Andri Johandri

Pengalaman Bidang IT :

- Pengembang Aplikasi Keuangan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tahun 1998
- Pengembang Dan Konseptor Layanan Pembelajaran Multimedia Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2006
- Penetration Tester Smatcard JakCard Bank DKI Jakarta Tahun 2001
- Pengembang Teknologi Smart Intelegent Content Delivery Network Multimedia Tahun 2002
- Penetration Tester Multimedia Helix Network Foundation Tahun 2005
- Pengembang Layanan Aplikasi Pemerintahan Tahun 2003 - 2017
- Pengembang Teknologi Streaming Multimedia PT. Exim Processing Indonesia Tahun 2004 - 2010
- Pengembang Layanan Sistem Informasi Desa Direktur Pemberdayaan Informatik Kementrian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2016
- Pengembang Teknologi Komunikasi Mini Computer PERINTIS tahun 2014 - 2016

PEMBANGUNAN E-GOV

ANALISA KONSEP EGOV YANG ADA SAAT INI

- Electronic Government adalah layanan Pemerintah berbasis Digital bersifat terbuka yang mudah diakses oleh banyak orang (Media Webbased)
- Pembangunan Terkotak-kotak karena layanan dibangun setiap instansi secara sendiri-sendiri.
- Aplikasi semakin bertambah banyak namun pemanfaatan aplikasi sangat minim.
- Smart City Lebih Mengarah pada ketersediaan infrastruktur bukan pada brainware pengguna terhadap layanan yang dikembangkan.
- Peningkatan SDM Bidang TIK hanya mengugurkan kewajiban , tanpa meliterasi manfaat data digital sebenarnya



SISTEM INFORMASI DESA

PENUNJANG DATA EGOV DAERAH KABUPATEN

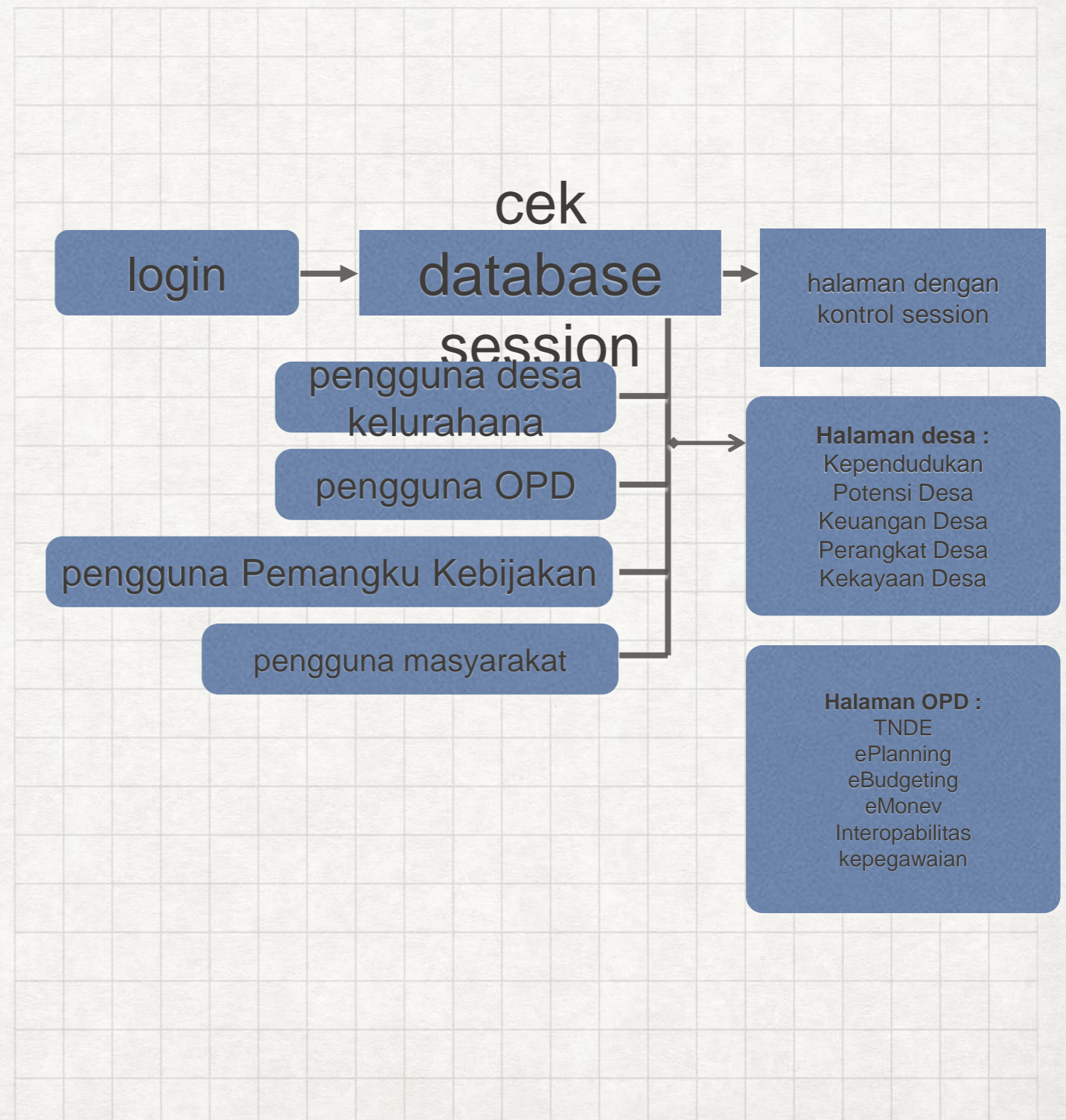
- Desa selalu dianggap sebagai object percontohan aplikasi dan data , padahal desa adalah subyek dari ketersediaan data bagi pemerintah.
- UU Desa adalah kekuatan Desa didalam menentukan dirinya sebagai Subyek Darai Ketersediaan Data tersebut dengan tercantumnya pelaksanaan Sistem Informasi Desa Dan Kawasan salam UU Desa tersebut.
- Hal penting dalam ketersediaan data adalah data pertumbuhan penduduk, potensi desa dan keuangan sebagai portret kemandirian desa didalam proses perencanaan pembangunan (UU no 6 than 2014 , Pergub Jawa Tengah no 47 Tahun 2016)
- Dengan ketersediaan Data ini di Desa maka dapat dijadikan satu bagian dari Data terbesar dalam proses e-Gov pemerintah kabupaten.



SINGLE SIGN ON

LAYANAN INTEGRASI E-GOV

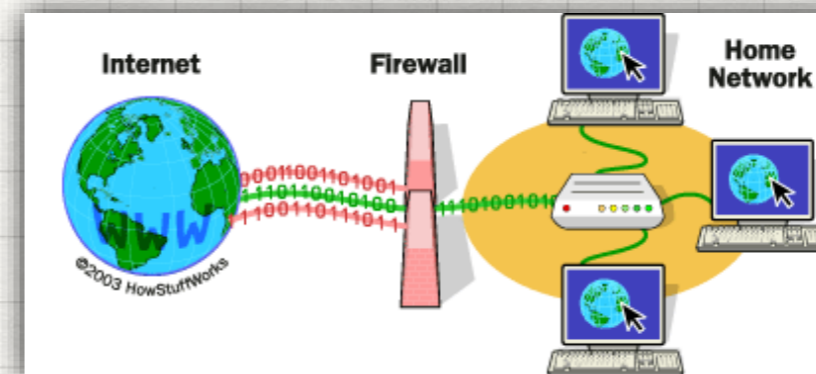
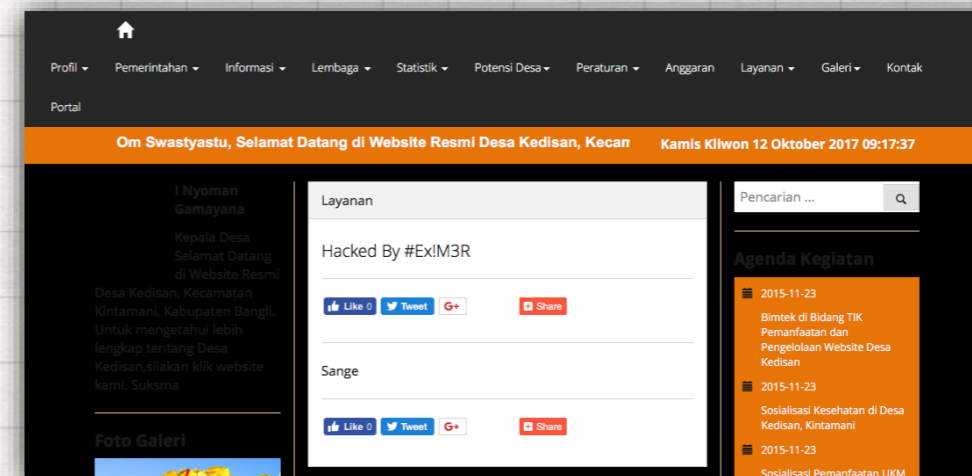
- Satu kali Log In (Masuk) untuk semua atau dikenal dengan istilah Single Sign On adalah metode sistem bagi pengguna untuk mendapatkan seluruh layanan aplikasi sesuai peruntukannya cukup dengan satu kali Login (masuk).
- Integrasi Data harus mampu mengkomunikasikan data dengan instansi yang membutuhkan data itu sendiri tanpa harus disulitkan dalam proses pengolahan data tersebut.
- Kabupaten dengan jumlah Dinas (OPD), Kecamatan, Kelurahan dan Desa adalah bagian dari pengguna data sehingga perlu adanya management pengguna dengan data egov yang terbangun sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya
- Single Sign On Memberika Kemudahan dalam proses kewenangan Data yang di proses selanjutnya



KEAMANAN SISTEM

MEMBANGUN LAYANAN YANG AMAN

- Laporan
- Layanan Bagi Pemerintah Desa seperti website desa sangat rentan dari kejahatan dunia internet (Deface web / Hacking) demikian pula dengan layanan informasi data pemerintah lainnya.
- Pengetahuan SDM Mengenai penyerangan terhadap layanan data yang bersifat online atau offline masih sangatlah kurang , hal ini menyebabkan kerugian yang cukup besar pada saat layanan tersebut mendapat serangan.
- Perlu adanya ketersediaan SDM yang mampu bekerja didalam penanganan keamanan serta memberikan shared knowledge kepada operator desa dan operator data opd lainnya mengenai keamanan data .



BIG DATA DAN OPEN GOV

PENYEDIAAN DATA TERBUKA PEMBANGUNAN

- Desa dan Kelurahan dengan ketersediaan data yang dimiliki baik data potensi desa , data informasi desa melalui website dan social media adalah sumber dari Big Data yang harus digali setiap waktu untuk menghasilkan sebuah analisis mendasar terhadap proses pembangunan pemerintah kabupaten.
- Teknologi Big Data dan Analisis Statistik yang saat ini berkembang perlu mendapatkan perhatian bagi egov kabupaten didalam proses pengambilan keputusan terutama pada sentimen dan penilaian publik mengenai pembangunan yang telah dilakukan
- Pengembangan Big Data dan Open Gov dalam layanan egov kabupaten menjadi dua arah yaitu untuk kepentingan Internal pemerintah dan kepentingan publik sebagai informasi pembangunan , dan proses ini harus dibangun dengan proses keberlanjutan (Sustainable) yang terencana pada tahun awal Grad Design Egov Kabupaten



TAHAP PEKERJAAN INTEGRASI

CATATAN PEKERJAAN YANG TELAH DILAKUKAN

- Pembangunan Layanan Interopability (Mesin Komunikasi Data antar database aplikasi) Juli - September 2017
- Komunikasi Data Desa dengan Induk Data Pemerintah Kabupaten dilakukan pada Bulan Oktober 2017
- Komunikasi Data Aplikasi OPD terkait E-Planning , eBudgeting, EMonitoring dilakukan pada Bulan Oktober 2017
- Komunikasi Data Aplikasi OPD terkait pelayanan Masyarakat dilakukan pada Bulan November 2017
- Komunikasi Induk Data dengan layanan Open Gov (Big Data) dan Statistik Bulan Desember 2017 Tahap I

MACHINE
INTEROPERABILITY

Juli - September 2017

COMMUNICATION SYSTEM
MACHINE TO MACHINE
DATABASE

Oktober 2017

EXECUTIVE SYSTEM
EPLANNING BUDGETING
EMINEM

Oktober 2017

PELAYANAN MASYARAKAT

November 2017

OPEN GOV

Desember 2017

TERIMA KASIH